

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILPRES TAHUN 2019  
DI KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh :**

**DONI SAGIAR SURBAKTI**

**NPM. 1531040128**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILPRES TAHUN 2019  
DI KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh :**

**DONI SAGIAR SURBAKTI**

**NPM. 1531040128**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Pembimbing I : Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang dengan sistem demokrasi, Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratis. Kurangnya kesadaran partisipasi pada pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai kurang efektif dalam menghasilkan pemimpin. Kekecewaan sebagai masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi, salah satunya gulput. Golput adalah kelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian studi kasus (*field research*), dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan cara interview atau wawancara serta dibantu oleh beberapa dokumen, buku, artikel, dan jurnal. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Way Halim, Panwas yang ada di kecamatan Way Halim, dan KPU Kota Bandar Lampung, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, dan artikel. Temuan dalam penelitian ini ialah Partisipasi politik masyarakat dalam pilpres adalah suatu hak politik. Sebagai warga Negara Indonesia dengan sistem demokrasi hendaknya kita turut partisipasi dengan memberikan suara atas hak pilih. Kecamatan Way Halim merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung, namun dalam satu kecamatan angka golput tergolong masih tinggi, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya partisipasi politik masyarakat, selain itu juga kelalaian masyarakat dalam pelengkapan berkas administrasi domisili. Faktor pendukung partisipasi politik masyarakat, yaitu: Adanya rangsangan dari tiap kandidat, baik presiden dan wakil presiden, karakteristik pribadi seseorang, karakter sosial seseorang, dan situasi dan lingkungan politik. Serta faktor penghambat partisipasi politik masyarakat, yaitu: Ketakutan masyarakat akan konsekuensi negatif dan aktifitas politik, individu yang berasumsi bahwa keikutsertaan dalam bidang politik adalah hal yang sia-sia, apatisisme politik, dan ketidak lengkapan berkas administrasi kependudukan.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PILPRES TAHUN 2019 DI KECAMATAN WAY  
HALIM BANDAR LAMPUNG**

**Nama : Doni Sagiur Surbakti**

**NPM : 1531040128**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag.**  
**NIP.196505101929031003**

**Dr. Nadirsah Hawari, M.A.**  
**NIP.197406282008011013**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si.**  
**NIP. 197801302011012004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA  
PILPRES TAHUN 2019 DI KECAMATAN WAY HALIM BANDAR  
LAMPUNG**. Disusun oleh, **DONI SAGIAR SURBAKTI NPM: 1531040128**.

Program Studi: **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, Telah diujikan pada sidang  
Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan  
Lampung pada Hari/tanggal :

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Tin Amalia Fitri, N.Si.**

**Sekretaris : Eksa Prawisudawati Ulpa, M.Si.**

**Pembahas Utama : Drs. Effendi, M.Hum**

**Penguji Pendamping I : Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag.**

**Penguji Pendamping II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A**



**Mengetahui**

**Dekan, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**

**Dr. M. Afif Anshori, M.Ag.**

**NIP. 196003131989031004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ  
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa,dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil, dan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta Supriani dan Ayahku tercinta Dading Surbakti terimakasih atas segala cinta, doa, kesbar, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal'amin.*
2. Abangku terkasih dan tersayang Andika Surbakti, dan adikku Fitri Raskita Surbakti yang senantiasa mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku.
3. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak dari seorang ayahanda Dading Surbakti dan Ibunda Supriani, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Doni Sagiari Surbakti. Dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1996 di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. SD Negeri 2 Way Halim Permai, Kecamatan way halim, Bandar Lampung, Tamat pada 2008
2. Mts Al-Hikmah, Bandar Lampung tamat pada tahun 2011
3. SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Tamat pada Tahun 2014
4. Strata 1 Program studi Pemikiran politik Islam di Fakultas Ushuliddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 1 Desember 2019

**Doni Sagiari Surbakti**  
**1531040017**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillahirrabilalamin kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugrah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis , sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan sallam tak lupa kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Sosial dalam Program Pendidikan Pemikiran Politik Islam S1 pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul: **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILPRES TAHUN 2019 DI KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG”**. Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak **Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku kuliah.
5. Bapak **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**, dan Bapak **Dr. Nadirsah Hawari, M.A** selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2015 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh*

Bandar Lampung, 01 Desember 2019

**Doni Sagiari Suebakti**  
**1531040128**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10

### **BAB II      PARTISIPASI, PILPRES, DAN MASYARAKAT**

A. Partisipasi .....	18
1. Pengertian Partisipasi.....	18
2. Bentuk Dan Tipe Partisipasi.....	22
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi.....	25
4. Partisipasi Masyarakat .....	27
5. Partisipasi Politik .....	29
6. Macam-Macam Partisipasi Politik .....	30
7. Bentuk Partisipasi Politik.....	31
B. PILPRES (Pemilihan Umum Presiden) .....	34
1. Pemilihan Umum .....	34
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .....	34

C. Masyarakat .....	38
1. Masyarakat Modern .....	39
2. Masyarakat Tradisional.....	40
D. Tinjauan Pustaka .....	43

### **BAB III    PROFIL KECAMATAN WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

A. Sejarah singkat berdirinya kecamatan Way Halim .....	46
B. Struktur Organisasi dan Daftar Urutan Kepegawaian Kecamatan Way Halim .....	48
C. Keadaan Sosial Kecamatan Way Halim Bandar Lampung .....	50
D. Keadaan Keagamaan Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.....	51
E. Visi Misi Kecamatan Way Halim .....	52

### **BAB IV    PARTISIPASI    POLITIK    MASYARAKAT,    FAKTOR              PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT, MASYARAKAT WAY              HALIM PADA PILPRES 2019**

A. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 dikecamatan Way Halim, Bandar Lampung.....	55
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 Di Kecamatan Way Halim.....	63

### **BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1 Data Jumlah Hasil Suara Pilpres Tahun 2019 Kecamatan Way Halim**
- 3.1 Data Kelurahan Di Kecamatan Way Halim**
- 3.2 Data Pejabat Camat Di Kecamatan Way Halim**
- 3.3 Struktur Organisasi Dan Daftar Urutan Kepegawaian Kecamatan Way Halim**
- 3.4 Data Agama Yang Dianut Masyarakat Kecamatan Way Halim**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, akan lebih baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami dari makna yang ditulis oleh penulis. Adapun judul skripsi yang penulis akan buat yaitu **“Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 Di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung”**. Agar mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar dapat dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah pokok terkandung dalam judul tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman dan juga mengarah pada pengertian serta penjelasan yang diinginkan oleh penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut

terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.<sup>1</sup>

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.<sup>2</sup> Pilpres adalah rangkaian pemilihan umum, dimana setelah amendemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu.<sup>3</sup> Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 Dikecamatan Way Halim melalui proses yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat secara adil dan jujur.

---

<sup>1</sup>Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 21

<sup>2</sup>Myazinda, *Kelompok Sosial dan Kehidupan Masyarakat*, (USU Press, Medan, 2008): h.20.

<sup>3</sup>Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 26

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menulis judul skripsi tentang partisipasi politik masyarakat pada pilpres tahun 2019 dikecamatan way halim bandar lampung hal ini mempunyai beberapa alasan yang memotivasi penelitian judul tersebut adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Way Halim dalam pemilihan presiden serta wakil presiden di tahun 2019. Pentingnya partisipasi politik masyarakat kecamatan way halim dalam mensukseskan pilpres tahun 2019 serta menekan suara golput dan tidak sah.

### **2. Alasan Subjektif**

Partisipasi politik masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung sebagai mana mestinya, hal ini dapat dilihat dari data dilapangan. Selain itu permasalahan ini sangat relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Jurusan Pemikiran Politik Islam.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi



tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses tersebut.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan system demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden dan wakilnya merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi

merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Kurangnya kesadaran partisipasi pada pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai kurang efektif dalam menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, dilain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilihan langsung hanya melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan sebagai masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi, salah satunya golput. Golput adalah kelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya.<sup>5</sup>

Menurut Irwan H. Dulay : Golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemiliha dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa (pilkades). Golput disebut juga dengan abstain atau blanko padaa even pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau suatu perusahaan.<sup>6</sup>

Golput merupakan hal yang dinilai kurang baik dalam proses pemilihan langsung. Kita dituntut agar berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilihan langsung. Hal itu juga diungkapkan oleh Rensi S,P. M.H. salah satu anggota KPU Kota Bandar Lampung : “Golput itu tidak bagus, kita harus berpartisipasi aktif

---

<sup>4</sup>Soekarno,Hatta dalam skripsi perilaku memilih mahasiswa pada pemilihan umum legislative2009 di kabupaten sinjai. Hal . 5

<sup>5</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 208

<sup>6</sup>Efriza, *op. cit.*, h. 534

dalam pemilihan. Membangun kesadaran politik itu susah tidak seperti membalikan telapak tangan. Salah satu upaya dalam membangun kesadaran politik yaitu dengan menjalankan komunikasi dengan baik”.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Asfar, golput disebabkan karena ada beberapa hal yaitu: Pertama, orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. "Atau karena faktor sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg atau pasangan capres yang ada tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Ketiga, masyarakat yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai pemilu tidak ada gunanya. Karena menganggap tidak linier dengan kesejahteraan yang mereka idam-idamkan.”<sup>8</sup>

Pemilihan langsung memberikan suatu hal yang baru dimana masyarakat akan lebih merasakan kebebasan demokrasi demi tercapainya masyarakat yang demokratis, untuk menuju masyarakat yang demokratis perlu diketahui bagaimana masyarakat ikut aktif dalam memberikan atau menyalurkan aspirasi politiknya.

Kegiatan politik masyarakat merupakan suatu proses kesadaran politik, dimana cara menyampaikannya berbeda-beda. Ada yang ikut bekampanye

---

<sup>7</sup>Rensi, Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Diskusi Politik Bandar Lampung, 23 Mei 2019, Pukul 13.00 WIB

<sup>8</sup>Efriza, *op. cit.*, h. 534



langsung mendukung sang calon pemimpin dan ada juga yang langsung memberikan hak suaranya pada hari pemilihan. Kesadaran politik tentunya sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi Indonesia, terutama dalam proses memilih pemimpin. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam membangun kesadaran politik masyarakat, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberikan keuntungan kepada mereka.<sup>9</sup>

Secara umum pemilu disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, karena dalam pemilu tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan kebutuhannya akan seorang pemimpin atau wakil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mensukseskan calon pemimpin atau wakilnya agar terpilih. Akan tetapi di antara sebagian masyarakat ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses pemilihan itu, bahkan tidak turut serta dalam pemilu yang diselenggarakan mereka ini dikenal dengan istilah golongan putih (Golput)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Khairudin H, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). H. 126

<sup>10</sup> KPU Kota Bandar Lampung, *laporan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD KAB/KOTA Tahun 2019*

Berikut ini data jumlah suara hasil pilpres tahun 2014 dikecamatan way halim bandar lampung :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara**  
**Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014**  
**Kecamatan Way Halim**

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Jumlah Suara Sah	42,645 Jiwa	90,5%
2	Jumlah Suara Tidak Sah	442 Jiwa	1,3%
3	Golput	5,538 Jiwa	8,2%
4	Jumlah Seluruh DPT	44,091 Jiwa	100%

*Sumber :Data, Kecamatan Way Halim*

Berikut ini data jumlah suara hasil pilpres tahun 2019 dikecamatan way halim bandar lampung :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara**  
**Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019**  
**Kecamatan Way Halim**

*Sumber :Data, Kecamatan Way Halim.*

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jumlah Suara Sah	35,680 Jiwa	90,3%
2	Jumlah Suara Tidak Sah	492 Jiwa	1,3%
3	Golput	3,322 Jiwa	8,4%
4	Jumlah Seluruh DPT	39,494 Jiwa	100%

Terlihat permasalahan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden salah satunya yang terjadi pada daerah kecamatan Way Halim Bandar Lampung yang dimana pada pilpres Tahun 2014 angka golput sebesar 8,2 lebih rendah di bandingkan angka golput pada pilpres Tahun 2019 dengan

daftar pemilihan tetap kecamatan way halim adalah sebesar 39,494 yang ada di 6 kelurahan dan 181 TPS, dan dilihat dari DPT tersebut bahwa hampir 8,4% masyarakat tidak menyalurkan hak suaranya. Pada kecamatan Way halim Bandar Lampung dengan 3,322 Jiwa atau 8,4% yang golput dan 492 Jiwa atau 1,3% suara yang tidak sah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilpres diwilayah kecamatan Way Halim Bandar Lampung. penelitian ini mengambil judul: partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres Tahun 2019 Di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?
2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait seperti KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap jumlah masyarakat yang berpartisipasi atau ikut serta memilih dalam pemilihan umum 2019 di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung .

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis dan untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Lampung dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

## **F. Metode Penelitian**

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka



diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>11</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden.<sup>12</sup> Dimana penelitian ini dilakukan dikecamatan way halim Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>13</sup> Selain itu juga memberikan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait untuk menghasilkan temuan data atau kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan serta bersumber dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran.

---

<sup>11</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>13</sup> Husaini usman, Purnomo Setiady akbar, *Metodelogi Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 4

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>14</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Way Halim, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Halim (Panwascam), dan KPU Kota Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dipublikasikan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri.<sup>15</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Selain itu terdapat situs-situs atau *website* yang dapat diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai penunjang data-data untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, Edisi Revisi, 2015), h. 137

<sup>15</sup> *Ibid* .,h. 58.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>17</sup> Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap paham dan jelas mengenai masalah yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel yang akan dijadikan sumber wawancara, *purposive sampling* merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, dan sampel ini sangat cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Selain itu dengan teknik *purposive sampling* kita hanya memilih beberapa sampel yang dijadikan sebagai informan yang sekiranya sudah mampu memberikan jawaban atas informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak

---

<sup>16</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.11 70.

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Op Cit*, h. 107

yang berkaitan seperti masyarakat kecamatan Way Halim, panitia pengawas kecamatan (PANWASCAM), dan KPU Kota Bandar Lampung. Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dedi Triyadi (45 tahun), sebagai Ketua KPU Kota Bandar Lampung.
- 2) Saiful Anwar (48 tahun), sebagai Kasubag Umum KPU Kota Bandar Lampung.
- 3) M. Badarudin (44 tahun), staf di KPU Kota Bandar Lampung.
- 4) Andi (41 tahun), sebagai Ketua Panwas Kecamatan Way Halim.
- 5) Akuan (41 tahun), sebagai Ketua Panwas Kelurahan Way Halim Permai.
- 6) Muhammad Fahmi (28 tahun), sebagai Ketua Panwas TPS 01 Kelurahan Way Halim Permai.
- 7) Nizar (35 tahun), sebagai Anggota Panwas Kelurahan Way Halim Permai.
- 8) Rifki Satria Kurniawan (31 tahun), sebagai Anggota Panwas Kelurahan Way Halim Permai.
- 9) Muhammad Ilham Akbar Sitorus (26 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 10) Murdani (24 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 11) Andika (28 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.



- 12) Fergiana Zhafira (23 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 13) Sulistiono (39 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 14) Roli Feri Casagi (25 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 15) Septi Purnama Sari (25 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 16) Framika (27 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 17) Hana Ustariana (27 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.
- 18) Avaldo Tantra (27 tahun), sebagai masyarakat Kecamatan Way Halim.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki suatu benda seperti buku-buku, majalah berkas peraturan sekertasis pada suatu rapat, dan catatan harian, untuk objek yang diamati agar mendapatkan informasi, dapat dipersatukan 3 macam sumber, yaitu sumber data berupa tulisan, sumber data berupa tempat (lokasi), dan sumber data berupa kertas ataupun sumber data berupa

seseorang baik sebagai pelaku atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>18</sup>

#### 4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Setelah data terkumpul dari obeservasi, wawancara dan dokumentasi sesuai pada kepentingan yang ditentukan, melangkah pada tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang telah dikumpulkan menggunakan cara klarifikasi atas segala jawaban agar data yang sudah didapatkan mampu dianalisa sesuai dengan data lapangan, analisis ini memakai teknik analisis kualitatif yang digambarkan menggunakan kata ataupun kalimat selanjutnya dipisahkan sesuai dengan kategori agar dapat disimpulkan agar menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir secara induktif, berfikir secara induktif merupakan berasal dari fakta khusus, peristiwa khusus lalu ditarik kegeneralisasi, maka dari itu perlu diingat dengan teliti, seperti yang telah disampaikan semakin lama waktu penelitian dilapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit, agar perlu dilakukan segera penganalisan data dengan reduksi data, mereduksi data

---

<sup>18</sup> Cholid Nuroboko dan Ahmadi, op.cit, h. 85.

merupakan mengambil intisari, memilih hal yang terpenting, dicari tema dan pola, dengan seperti itu data yang telah direduksikan akan memberi gambaran secara jelas, dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>19</sup>

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang muncul berdasarkan data dengan berwujudkan kata-kata dan bukan merupakan angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang menggambarkan setiap variabel, satu persatu dengan tujuan mengumpulkan informasi actual secara rinci dalam mengidentifikasi masalah.

Perolehan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan analisis dan kesimpulan tersebut maka akan menjawab segala pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>19</sup> Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", (Bandung Penerbit Alfabeta, 2017), h. 247.



## **BAB II**

### **PARTISIPASI, PILPRES, DAN MASYARAKAT**

#### **A. Partisipasi**

##### **1. Pengertian Partisipasi**



Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.<sup>20</sup>

Huntington membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu.
- e. Partisipasi ialah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

---

<sup>20</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) h.39

f. Partisipasi adalah kerlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.<sup>21</sup>

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

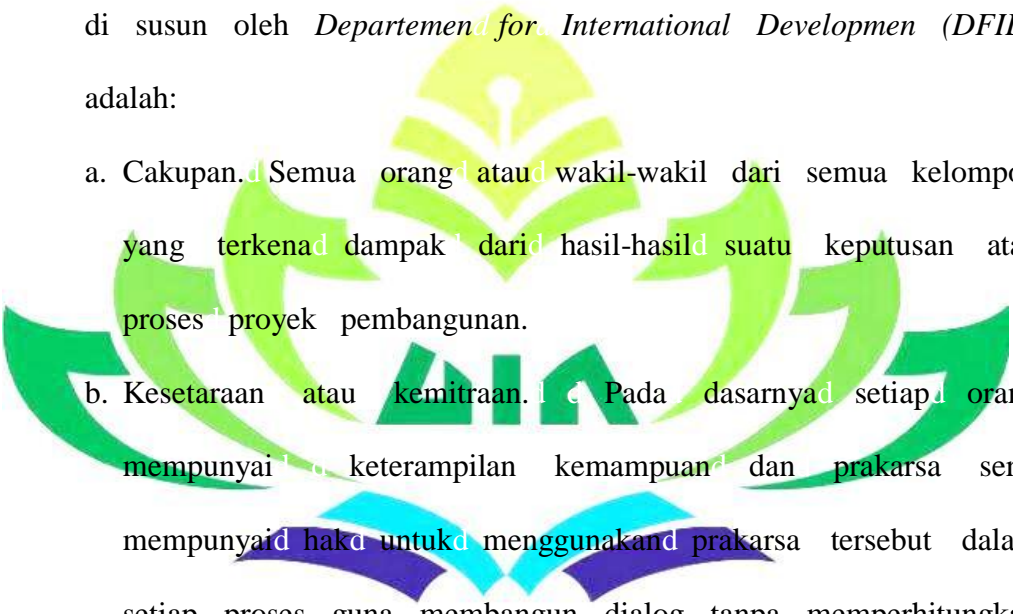
Apa yang diinginkan dicapai dengan adanya partisipasi adalah

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h.202

meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka lebih panjang.<sup>22</sup>

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagai mana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang di susun oleh *Departemen for International Development (DFID)* adalah:

- 
- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkenad dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
  - b. Kesetaraan atau kemitraan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
  - c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehinga menimbulkan dialog.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.209

- d. Kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak punya tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga mempunyai keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk Dan Tipe Partisipasi

---

<sup>23</sup>Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2008), h.124.



Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representasi.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi

keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbang dan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representative dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi

vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional serta meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe

partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

#### **a. Usia**

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### **b. Jenis kelamin**

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

#### c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

#### e. Lamanya tinggal



Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.<sup>24</sup>

#### 4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam

---

<sup>24</sup>Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer*(Jakarta: Prestasi Pustakarya 2008), h.126-127.

lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental.

d. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

e. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus

ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

## 5. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>25</sup> Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi

---

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1998), h. 25.

politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>26</sup> Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Menurut Herbert Mc Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembetukan kebijakan umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 183-184.

## 6. Macam-macam Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3 macam<sup>29</sup> yaitu :

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel, membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis,<sup>30</sup> yaitu:

- a. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 186.

<sup>30</sup> Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 152.



kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

- d. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>31</sup>

## 7. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk<sup>32</sup> sebagai berikut:

- a. *Electroral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh

---

<sup>31</sup> A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 57.

<sup>32</sup> Mas'ood, Mochtar dan Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 225.

politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.

d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.

e. *Violence*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan<sup>1</sup> dan pengrusakan.

Sedangkan Dalton<sup>33</sup> mengelompokkan bentuk partisipasi politik<sup>33</sup> sebagai berikut:

a. *Voting*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (*voting/electing*). *Voting* adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.

---

<sup>33</sup> Dalton, R, Almond G, Powell, Stromp K, *Comparative Politics Today: A World View, 9th edn.* (New York: Person Longman, 2009), h. 203.

b. *Campaign activity*, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.

c. *Communal Activity*, bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (*out side electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.

d. *Contacting personal on personal matters*, bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan.

e. *Protest*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang *unconventional* seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah partisipasi masyarakat kecamatan Way Halim dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tahun 2019. Dengan penelitian ini peneliti akan mengetahui bagaimanakah partisipasi dan antusiasme sebagai masyarakat kecamatan Way Halim dalam pilpres.

## **B. PILPRES (Pemilihan Umum Presiden)**

### **1. Pemilihan Umum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemilu merupakan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat.<sup>34</sup> Secara konseptual pemilu menurut Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk

---

<sup>34</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2015), h. 49.

pemerintah yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>35</sup>

Pemilihan umum secara teknis operasional menurut para ahli diungkapkan oleh Umarudi Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknik pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara dari rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat dan secara luas lagi pemilu, menurut Adrewd Reynold menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.<sup>36</sup>

Pemilihan dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, dimana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 50.

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 51.



Pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara. Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>37</sup> Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian

---

<sup>37</sup>Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), h. 168.

ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.<sup>38</sup>

Masalah dan gejala seringkali terjadi ditengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejala dan konflik. Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 168.

## 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasal yang mengatur tentang pemilihan umum (pemilu) yaitu pasal 22E dan pasal 6A. Dalam pasal 22E dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Hal ini berarti bahwa masa jabatan sebagai presiden berlaku dalam 5 tahun selama satu periode. Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dalam pemilihan presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini pelaksanaan pemilu diubah presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. Presiden dan wakilnya dapat mencalonkan diri atau dicalonkan. Kemudian pemilu dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Umumnya pelaksanaan pemilihan presiden dilaksanakan serentak di setiap tempat. Selama pemilu berlangsung rakyat berhak memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan keinginannya. Perolehan hasil pemilu merupakan hasil yang menjadi keputusan mutlak bagi pasangan presiden dan wakil

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 169.

presiden terpilih.<sup>40</sup> Pemilihan presiden dalam penelitian ini adalah pemilihan presiden yang dilakukan pada tahun 2019.

### C. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu:<sup>41</sup>

1. Interaksi antar warganya.
2. Adat istiadat.
3. Kontinuitas waktu.
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 173.

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h. 115-118.

usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

#### 1. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.<sup>43</sup> Berdasar pada pandangan hukum, menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas

---

<sup>42</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), h. 116.

<sup>43</sup> Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi Program Ilmu-ilmu Sosial*, (Klaten: Intan Pariwara, 1988), h.156.



ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpacu pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.<sup>44</sup>

## 2. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis.<sup>45</sup> Dari pengertian tersebut

---

<sup>44</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 206.

<sup>45</sup> Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi Program Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Intan Pariwara, 1988), h.152.

dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis. Hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:<sup>46</sup>

- a. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya.
- b. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris.
- c. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah.
- d. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar.
- e. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.156.

- f. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal.
- g. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil.
- h. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan.

Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik masyarakat tradisional berdasarkan hukum, bahwa masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), dan konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu.<sup>47</sup>

Penjelasan yang telah disampaikan dapat dimaknai dengan keseragaman masyarakat yang sering dijumpai pada masyarakat tradisional lebih patuh terhadap hukum adat daripada negara atau hukum nasional. Dalam masyarakat tradisional hukum yang ada bersifat represif. Hukum dengan sanksi represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan hukuman.

---

<sup>47</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 205.

Pelanggaran peraturan-peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman.<sup>48</sup> Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Bandar Lampung yang bertempat tinggal dikecamatan Way Halim.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa hasil penelitian yang dapat dimunculkan disini, antara lain: Pertama, **“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”**.<sup>49</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang berupa Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Huda,<sup>49</sup> Mahasiswa S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah pada tahun 2014. Dalam hal ini, Syaiful Huda menyimpulkan bahwa respon masyarakat dalam pemilu, cenderung menerima *money politic*. Meski demikian, sebagian mereka juga tetap ingin berpartisipasi meskipun tidak ada praktek *money politik*. Jika dilihat lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor hubungan masyarakat dengan calon

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 204.

<sup>49</sup> Syaiful Huda, Skripsi, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, (Pontianak : IAIN Pontianak, 2014), h. iii.

(4%), faktor money politic (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%). Penelitian ini cukup representative untuk dijadikan sebagai gambaran mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, baik pemilu lokal, pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Akan tetapi, tentu saja berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kecenderungan masyarakat Kecamatan Mompow Hilir Kabupaten Mompow.

Kedua, **“Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilu Lokal Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta”**. Pustaka ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Laelah Kodariah<sup>50</sup> pada tahun 2012. Dalam hal ini, Laelah melaporkan bahwa siswa MAN II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam Pemilu Lokal. Bentuk partisipasi politik yang diikuti siswa diantaranya melakukan pemilihan, kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan. Sebagai bentuk partisipasi publik, data penelitian ini cukup memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya masyarakat turut serta dalam pemilu. Mensosialisasikan program KPU, calon, mengawasi kecurangan pemilu secara mandiri, dan ikut dalam pemilihan, merupakan cara-cara yang baik dalam berpartisipasi. Akan tetapi, paling tidak, hadir dalam pemilihan dan ikut

---

<sup>50</sup> Laelah Kodariah, Skripsi, *Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilu Lokal Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. iii.



memilih, sudah cukup sebagai bentuk partisipasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan indikator Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

Melalui kedua hasil penelitian (bahan pustaka) di atas, dapat dilihat bahwa keduanya memang berbicara tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah objek dan metode yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dipastikan dengan tidak adanya kesamaan dalam penelitian, adapun beberapa teori yang berkaitan telah diberi *fotenote* dan sumber.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, (2004. Bandung: J-Art)
- Prof. R. H. A. Soenaryo, SH., Dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, Jakarta, 1989)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- M. Bahri Ghazali, *Studi Agama-Agama (Memahami Agama Masyarakat)*, Yogyakarta: Penerbit CV, Amanas, 2010)
- M. Bahri Ghazali, *Kesehatan Mental I*, (Bandar Lampung : Harakindo Publishing, 2016)
- M. Bahri Ghazali, *Kesehatan Mental II*, (Bandar Lampung: Harakindo 2018)
- M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Untuk Konselor*, (Yogyakarta: Samudra Biru 2012)
- Harun Nasution, *Islam Di Tinjau Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Pres, 1986)
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Jalaluddin, Dalam Sigmud Freud, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT. Gunung Agung 1986)
- Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982)
- Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1978)

Dr. Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Haji Mas Agung, Jakarta, 1990)

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, ( Jakarta: Deponegara, 1993)

Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama menurut Al-Qur'an (Telaqah Aqidah dan Syariah)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Renika Cipta, 1993)

Sarjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : Raja wali Press, 2000)

User Usma, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2010)

Arifin, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 1989)

Suryono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984)

Hery Noer Ali, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000)

In, Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam & Psikologi Kontemporer*, (Malang ; UIN-Malang Press, 2009)

Halimatus Sakdiah, *Pengantar Psikologi Agama* (Banjarmasin : Center for Community Development Studies/Comdes Kalimantan, 2009)

Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka 2006)

Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1986)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)

Hasan Langgulung, *Teori-teori Kesehatan Mental*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986)

Abdul Aziz El-Quussey, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Dr. R. H. Su'dan M. D., SKM., *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997)

Basri Ibn Asghary, *Solusi al-Qur'an tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, (Rinika Cipta, Jakarta, 1994)

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990)

Drs. Asmaran As., MA., *Pengantar Studi Akhlak*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1992)

Drs. Barmawie Umary, *Materi Akhlak*, Ramadhani, (Solo, 1995)

Dr. H. Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1996)

Dr. Kartini Kartono, Dr. Jenny Andary, *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, (Bandung : Mandar Maju , 1989)

M. Bambang Pranowo, dkk, *Materi Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyuluh Agama Islam Terampil*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

(<https://kbbi.web.id/korelasi>).

Dokumen, Majelis Ta'lim Al-Hidayah